

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BISNIS
PERIKLANAN ADSENSECAMP
(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah**



**Disusun Oleh:
Lugita Anggraini
1521030073**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2019-2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BISNIS
PERIKLANAN ADSENSECAMP
(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)**

Skripsi

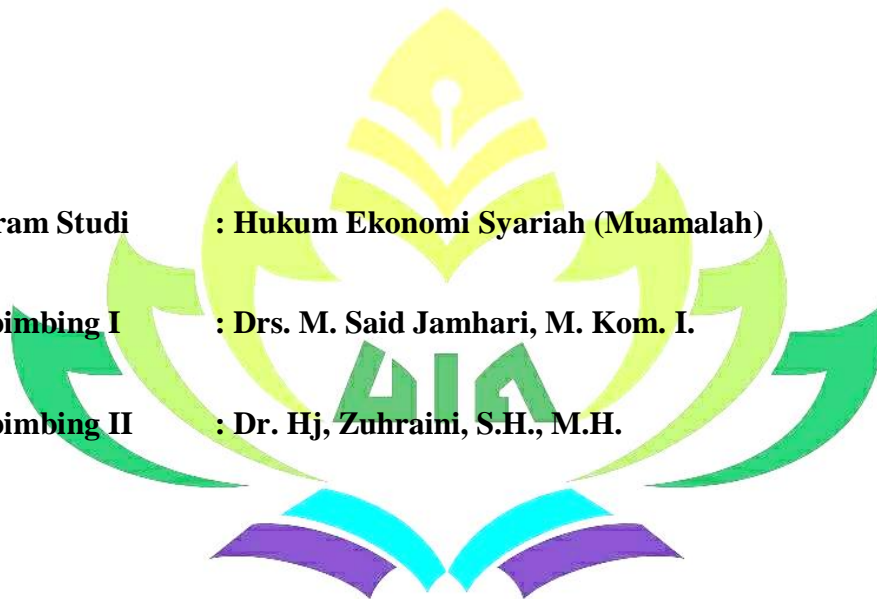
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**Disusun Oleh:
Lugita Anggraini
1521030075**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. M. Said Jamhari, M. Kom. I.

Pembimbing II : Dr. Hj, Zuhraini, S.H., M.H.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BISNIS PERIKLANAN *ADSENSECAMP*

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Oleh :

Lugita Anggraini

Adsensecamp adalah salah satu pelopor layanan *adsense* di Indonesia. Yaitu periklanan online yang menggunakan sistem PPC (pay per click) dimana *publisher* (pemilik website) akan mendapatkan uang dari *Adsensecamp* jika pengunjung website mengklik iklan atau link iklan yang ditampilkan pada situs atau website nya. *Publisher* akan mendapatkan bayaran dengan kisaran Rp 300/klik. Jika balance uang yang tersimpan di *adsensecamp* sudah mencapai minium pembayaran tersebut, uang bisa ditransfer ke rekening bank *publisher*.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek sistem bisnis periklanan *Adsensecamp* dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek sistem bisnis periklanan *Adsensecamp*. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek sistem bisnis periklanan *Adsensecamp* dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem bisnis periklanan *Adsensecamp*.

Metode penelitian yang digunakan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yang sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder serta melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, perjanjian dalam bisnis periklanan *adsensecamp* dilakukan oleh *publisher* dan pihak *adsensecamp*. Pemilik blog atau website akan mendapatkan pembayaran atau pemasukan berupa pembagian keuntungan untuk setiap iklan yang di klik oleh pengunjung situs, yang dikenal dengan *pay per clik (ppc)* atau bayar perklik.

Perjanjian dalam bisnis periklanan *adsensecamp* termasuk akad *shahih* karena terpenuhinya rukun dan syarat dari akad, sistem kerja yang diterapkan dalam bisnis periklanan *adsensecamp* termasuk musyarakah yang masing-masing pihak berkontribusi dalam bisnis. *Publisher* selaku pemilik blog atau website yang mempublikasikan iklan dengan menggunakan blognya yang dikelola langsung oleh *publisher* sedangkan pihak *adsensecamp* selaku pemilik modal yang dalam hal ini berupa iklan yang dikelola oleh pihak *adsensecamp*. Sementara pembayaran dilakukan apabila *publisher* telah mendapatkan klik yang seharga dengan 100\$, hal ini sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan antara pihak *adsensecamp* dan *publisher*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarama 1. Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **Lugita Anggraini**

NPM : **1521030073**

Program Studi : **Mu'amalah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Bisnis Periklanan
Adsensecamp (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I.

NIP. 195411131985031001


DR. HJ. Zuhraini, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

Ketua Jurusan Mu'amalah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bisnis
Periklanan Adsensecamp (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan
Muamalah Angkatan 2015 UIN Raden Intan Lampung)**, Disusun oleh **Lugita
Anggraini, NPM 1521030073** Program Studi Muamalah telah diajukan dalam
sidang munaqosyah di Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung pada
Hari/tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

Sekretaris : **Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.**

Penguji I : **Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.I.**

Penguji II : **Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Khairuddin, M.H

06210221993031002

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". QS. Al-Qhasas (28) : 26¹



¹ Al, Qur'an dan Terjemahan, Cordova, Cetakan, 2013, h, 385.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah menyayangi, melindungi, mengasuh dan mendidik dari sejak kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendoakan serta mengharapkan keberhasilan saya. Dan berkat doa restu keduanya lah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dan kuliah saya.
2. Untuk adik ku tercinta Luhsinta Anggiana adikku satu-satunya yang selalu mendukung dan membantu saya.
3. Almamater dan kampusku tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Lugita Anggraini, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 30 Mei 1997, putri pertama dari dua bersaudara.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-kanak Tunas Melati 2 PTP. Nusantara VII PPKR. Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan selesai pada tahun 2003.
2. Sekolah Dasar Negeri Sidorejo 2 Kec. Kendal Kab. Ngawi Jawa Timur pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Magetan Jawa Timur pada tahun 2009 hingga lulus tahun 2012.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Bandar Lampung pada tahun 2012 hingga lulus tahun 2015.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2015 hingga selesai tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT penulis ucapkan karena telah diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bisnis Periklanan *Adsensecamp* (Studi Kasus Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Khoiruddin, M.Si., selaku ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I. sebagai pembimbing I serta Dr. Hj, Zuhraeni, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2015 UIN Raden Intan Lampung yang telah bersedia penulis wawancarai untuk keperluan skripsi.
6. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Muamalah 2015. Untuk semua sahabat-sahabatku tercinta dan teman-temanku tersayang yang selama ini telah mendampingi dan menemani saya selama kuliah hingga mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
7. Almamater dan kampus tercinta.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya pengembangan penelitian lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Bisnis Islam.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019

Lugita Anggraini

1521030073

DAFTAR ISI

JUDUL	
ABSTRAK	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN	
PERSEMBAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerjasama Dalam Islam	15
B. Perjanjian Dalam Islam	32
1. Pengertian Akad	33
2. Rukun dan Syarat Akad	35
3. Macam-macam Akad	38
4. Asas-asas Akad	48
5. Berakhirnya Akad	60
 BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Bisnis Adsensecamp.....	62
B. Cara Mengikuti Adsensecamp	63
C. Cara Kerja Adsensecamp	65
D. Cara Pembayaran Adsensecamp	68
 BAB IV ANALISIS	
A. Bagaimana Praktik Sistem Bisnis Periklanan Adsensecamp	70
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Periklanan Adsensecamp.....	74
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Periklanan *Adsenscamp* (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)** yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)²
2. Hukum Islam Adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat yang untuk semua yang beragama islam.³
3. Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lain, yang tidak menghendaki adanya konflik didalamnya.⁴
4. Bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha koersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner (1992) mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.⁵

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1050.

³ Amir Syamsudin, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu, (PT. Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1997), h. 5.

⁴ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 187.

⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 15.

5. Periklanan atau iklan adalah berita pesanan dengan maksud untuk mendorong, membujuk khalayak ramai tentang benda dan jasa yang ditawarkan. Atau pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual yang biasanya dipasang di dalam media masa seperti surat kabar dan majalah atau media lainnya.⁶
6. *Adsensecamp* adalah sebuah situs dimana didalamnya terdapat sebuah sistem untuk mengiklankan produk atau apapun oleh pengiklan atau Advertiser yang nantinya akan diiklankan oleh blogger disebut publisher, sistem tersebut dinamakan PPC (paid per click).⁷

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif, seiring majunya perkembangan jaman teknologi dalam bisnis muamalah terutama periklanan pun semakin banyak dan bermacam, sehingga sangat perlu memahami dengan benar bagaimana sistem dan cara kerja periklanan tersebut.
2. Alasan subjektif, judul skripsi ini sesuai dengan program studi penulis di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Serta sumber data yang mudah didapatkan sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), h. 117.

⁷<http://coretan-uman.blogspot.com/2013/03/apa-itu-adsense-Indonesia-atau-AdsensCamp.html?e=1>. Tanggal akses 19 Maret 2013.

C. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.⁸

Kegiatan bisnis dapat dirasakan oleh semua orang. Kita semua selalu terlibat dalam kehidupan sehari-hari dengan kegiatan bisnis. Setiap hari kita berbelanja di pasar, toko atau supermarket. Pada hakikatnya bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi ataupun masyarakat luas. Manusia bisnis (Businessman) akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang karenanya. Dari kepuasan masyarakat itulah si pengusaha akan mendapat keuntungan dan kemudian keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan bisnis atau usahanya agar menjadi lebih luas lagi bagi masyarakat yang lebih luas lagi ataupun membuka bisnis baru bagi kebutuhan masyarakat yang lain lagi.⁹

Bisnis juga dapat dibedakan berdasarkan atas jenis kegiatannya. Dimana atas dasar ini bisnis dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yaitu:

1. Bisnis Ekstraktif
2. Bisnis Agraria
3. Bisnis Industri

⁸Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Op. Cit. h. 17.

⁹Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 2.

4. Bisnis Jasa¹⁰

Bisnis ekstraktif adalah bisnis yang bergerak dalam jenis kegiatan pertambangan atau menggali bahan-bahan yang terkandung didalam perut bumi. Bisnis agraris adalah bisnis yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan serta kehutanan. Bisnis industri adalah bisnis yang bergerak dibidang industri manufacturing, misalnya industri tekstil, garmen, mesin-mesin, mebel dll. Bisnis jasa adalah bisnis yang bergerak dalam bisang jasa yang menghasilkan yg tidak berwujud seperti jasa pendidikan, kecantikan, perbankan, kesehatan dan sebagainya.¹¹

Dalam berbisnis tentu kita membutuhkan yang dinamakan pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu urat nadi dalam proses bisnis. Segala macam produksi, output dengan hasil terbaik pun tidak akan optimal diserap oleh konsumen jika tidak melakukan kegiatan pemasaran atau memiliki pemasaran yang bagus. Berbagai macam cara dapat dilakukan dalam memasarkan suatu produk sehingga sampai di tangan konsumen. Salah satu yang memiliki peranan penting saat ini adalah penggunaan iklan. Iklan atau periklanan merupakan bagian tak terpisahkan dari bisnis modern. Iklan dianggap sebagai metode yang ampuh untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak mengenai suatu produk yang dihasilkan dalam bisnis. Aneka ragam iklan mulai dari yang ditayangkan secara tradisional melalui media-media cetak maupun melalui media yang lebih modern seperti radio, televisi dan

¹⁰ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: Liberty Offset, 2002), h. 10.

¹¹ *Ibid*, h. 10.

internet. Kesemuanya itu sedikit banyak telah meningkatkan penjualan dari produk yang telah ditawarkan oleh suatu unit usaha.

Iklan atau periklanan biasa disebut Advertising. Advertising merupakan suatu cara untuk mempromosikan sesuatu dengan media tertentu, baik barang, acara, jasa, dan lain sebagainya. Hal ini sangat membantu bagi suatu instansi atau perusahaan agar publik dapat mengetahui apa yang sedang ditawarkan oleh instansi tersebut. Advertising adalah usaha yang bergerak di bidang periklanan. Advertising tidak akan pernah lepas dari ide. Karena dari ide inilah suatu iklan menjadi bernilai. Advertising menyediakan jasa pembuatan konsep, percetakan serta penempatan iklan, tergantung dengan jenis usaha advertising. Seiring dengan pesatnya dunia bisnis dan usaha, advertising dapat menjadi salah satu alternatif usaha, karena hampir semua perusahaan membutuhkan jasa periklanan. Bahkan, biasanya dalam suatu perusahaan, marketing adalah hal yang paling utama. Jadi, pangsa pasar untuk usaha advertising sangat luas. Dalam hal keuangan, advertising tidak membutuhkan banyak modal, karena fungsinya hanya sebagai distributor dengan mengandalkan kreatifitas. Advertising hanya memberikan ide-ide kreatif pada produk iklan.

Bisnis internet dengan program penyedia iklan saat ini sedang populer karena dengan prosedur yang mudah dan bebas biaya dapat menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Salah satu contoh bisnis melalui internet (online) adalah bisnis iklan yaitu *AdSense* camp, *AdSense* camp adalah salah satu pelopor layanan *adsense* di Indonesia. Merupakan agen periklanan

online yang menggunakan sistem PPC (pay per click) dimana publisher (pemilik website) akan mendapatkan uang dari *Adsensecamp* jika pengunjung website mengklik iklan atau link iklan yang ditampilkan pada situs atau website nya. Biasanya publisher akan mendapatkan bayaran dengan kisaran Rp 300/klik. Uang tersebut akan tersimpan otomatis di akun *adsensecamp*, dan akan bisa dicairkan jika sudah mencapai minimal pembayaran. Untuk sekarang minimum pembayaran *adsensecamp* adalah Rp 100.000. jika balance uang yang tersimpan di *adsensecamp* sudah mencapai minimum pembayaran tersebut, uang bias ditransfer ke rekening bank pemasang iklan.

Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah.

Adapun makna kata *tijarah* yang *kedua*, adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia.¹²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

¹²Ika Yuniza Fuzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 7-8.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada ayat tersebut diharapkan adanya suatu perniagaan yang adil dan saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. dan motif suatu perniagaan kehendaknya untuk beribadah, sehingga diharapkan hal ini bisa menjadi suatu kontrol bagi seorang peniaga atau pengusaha agar selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perilaku yang merugikan dalam suatu aktivitas bisnis.

Terlepas dari makna klasifikasi kata *tijarah* secara umum dan khusus, yang perlu dicermati bahwa bisnis di dalam Al-Qur'an selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi. Bisnis ataupun perniagaan yang bersifat duniawi diatur dalam beberapa ayat khusus yang membahas tentang perniagaan. Hal ini mencakup penjelasan tentang jual beli, yaitu apabila dilakukan secara tunai maka harus atas dasar kerelaan masing-masing pelaku. Dan apabila dilakukan secara tidak tunai, maka ada suatu tuntunan untuk menuliskan transaksi tersebut, dengan disertai dua orang saksi dan tidak mengurangi jumlah nominal kewajiban yang harus dibayarkan. Kemudian bisnis atau pun perniagaan ukhrawi banyak tercantum dalam ayat-ayat umum yang membahas tentang bisnis. Kenyataan ini menjadi suatu poin penting bahwa bahwa bisnis dan etika transendental adalah suatu hal yang tidak bisa terpisah dalam bisnis islam, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari mengingat Allah.

Dalam transaksi bisnis Islam, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad/aqd) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadith. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi bisnis, yang ketika akad dijalani dengan *fair*, maka akan menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.

Bisnis periklanan dengan sistem PPC merupakan salah satu transaksi bisnis dengan menggunakan jasa internet dalam hal ini tetap menggunakan akad. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti akad kerjasama dalam bisnis ini berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam.

Bisnis dengan menggunakan sistem PPC (pay per click) merupakan bisnis yang baru, sehingga masih banyak kelemahan didalam sistemnya, sebagai contoh untuk bergabung dalam *adsensecamp* maka pemilik situs wajib membuat kesepakatan yang dibuat secara sepihak oleh pihak *adsensecamp*. Sementara dalam sebuah perjanjian setidaknya terdapat asas-asas yang dibenarkan seperti, asas kerelaan, kebebasan, persaaan, keadilan, kejujuran, kemanfaatan dan tertulis.¹³

Selain itu pihak *adsensecamp* berhak mengeluarkan *banned* atas sebuah situs apabila situs tersebut dicurigai melakukan kecurangan dan iklan yang ditampilkan oleh *adsensecamp* bersifat acak sehingga iklan yang

¹³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 15.

ditampilkan bersifat umum, dari iklan penjualan buku, sampai pada penjualan minuman keras, pornografi dan sebagainya yang didalam Islam dilarang.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa dalam hal ini *adsensecamp* dalam menerapkan bisnis periklanan ini memiliki kuasa penuh mulai dari penentuan kebijakan sistem kerja sampai pembayaran yang diperuntukan kepada publisher. Dalam prakteknya, masih ditemukan banyak kecurangan dalam bisnis periklanan dengan sistem PPC seperti publisher mengklik sendiri link yang tersedia pada websitenya dengan tujuan memperbesar penghasilan yang didapat dari klik tersebut padahal hal ini bertentangan dengan TOS (*Term Of Service*) dan merugikan advertiser. Selain itu banyak iklan yang biasanya bertentangan dengan hukum Islam disebabkan keharamannya misalnya iklan judi, kasino, minuman keras dan pornografi. Dan masih banyak lagi permasalahan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud menganalisis sistem bisnis periklanan *Adsensecamp* dalam tinjauan hukum Islam untuk menentukan boleh tidaknya masyarakat muslim melakukan kerjasama bisnis dengan *Adsensecamp* untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan melakukan penelitian sekaligus menyusun skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Periklanan *Adsensecamp*” (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung).**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek sistem bisnis periklanan *Adsensecamp* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembayaran *Adsensecamp*?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek sistem bisnis *Adsensecamp*
- b. Untuk menganalisis tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem bisnis *Adsensecamp* dari perspektif hukum islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, untuk dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik khususnya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, serta bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem dalam bisnis berbasis internet menurut perspektif hukum islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.¹⁵

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku bisnis yakni publisher selaku mitra kerja dari *Adsensecamp*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹⁷ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku mengenai bisnis modern dan bisnis islam serta buku-buku tentang periklanan *adsensecamp* dan pemasaran

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. 7, (Bandung: CV Mandar Maju).

¹⁵Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 30.

¹⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁷*Ibid*, h. 57.

yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi berarti wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah mahasiswa fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung jurusan Muamalah angkatan 2015 yang berjumlah sekitar 350 mahasiswa.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Menurut Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah melakukan penelitian populasi. Arikunto menyatakan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah lebih dari 100 orang maka diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.²⁰ Mengingat populasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung jurusan Muamalah angkatan 2015 yang berjumlah 350 orang maka dalam penelitian ini diambil sampel

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 117.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 81.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 102.

sebanyak 15% dari populasi 350 orang, sehingga yang akan dijadikan sampel penelitian adalah 52 orang.

4. Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²¹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati situs yang terdapat *Adsensecamp*.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak berstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun via telepon. Dalam praktiknya penulis menggunakan wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yang dilaksanakan secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, pedoman yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan.²²
- c. Studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan yang sumber data dari penelitian ini juga menggunakan sumber data kepustakaan.

²¹Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 54.

²² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 65.

5. Analisis Data

Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²³ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem akad, sistem kerja serta pembayaran dalam bisnis periklanan *Adsensecamp* ditinjau dari hukum Islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



²³Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), H. 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerja Sama Dalam Islam

1. Definisi *Syirkah*

Syirkah secara etimologi didefinisikan sebagai berikut:

الإختلاط أى خلط أحد المالين بالآخر بحيث لايمتزان عن بعضهما

"percampuran, yakni bercampunya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.

Sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama

1. menurut Hanafiah

الشركة هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح

Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan.

2. Menurut Malikiyah

هي اذن في التصرف لهما معا انفسهما اى أن يأذن كل واحد من الشريكين

لصاحبه في ان يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما

Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satu¹⁵ untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.

3. Menurut syafi'iyah

وفي الشرع: عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على
جهة الشيوع

Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama

4. Menurut Hanabilah

الشركة هي الإجتماع في استحقاق أو تصرف

Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.²⁴

Ada perbedaan definisi *syirkah* di kalangan Ulama. Menurut Malikiyah, *Syirkah* adalah perkongsian dua pihak atau lebih di mana semua anggota perkongsian dua pihak atau lebih dimana semua anggota perkongsian tersebut mengizinkan anggota kalangan Hanafiyah *Syirkah* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut akad antara dua pihak yang berkongsi atau bersengkutu dalam modal dan keuntungan. Menurut kalangan syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal. Sementara kalangan Hanbaliyah berpendapat bahwa

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Rajawali Pers, 2016), h.127.

syirkah adalah persekutuan dalam hak dalam berusaha atau menjalankan sebuah usaha.

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai berikut:

“Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha teetentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagai bagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.

B. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan dasar hukum lainnya. Dasar hukum *syirkah* dalam Al-Qur'an antara lain adalah sebagai berikut:²⁵

- a) Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"

- b) Firman Allah dalam surat Sad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini"

Sementara dasar hukum *syirkah* dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Hadis riwayat dari Abu Hurairah:

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: *Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemui dua orang yang bermitrausaha*

²⁵ *Ibid,*

²⁶ *Ibid, h 128*

selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”.(HR. Abu Daud)

2) Rasulullah Saw. Bersabda:

Artinya: “Dari Saib al-Makhzumi r.a bahwasanya dia menjadi mitra Nabi SAW sebelum beliau menjadi Rasul, lalu mendatanginya pada hari pembebasannya kota Makkah, beliau berkata, selamat datang hai saudaraku dan mitraku (kongsi)”. (H. R Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Selain dasar hukum diatas, *syirkah* juga disyariatkan berdasarkan ijma’ atau kesepakatan ulama dan juga kesepakatan kaum muslimin. Dalam konteks Indonesia, dasar legalitas *syirkah* dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 134-186

C. Jenis-jenis Syirkah

Secara garis besar *syirkah* ada dua macam, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah ‘uqud*. *Syirkah amlak* adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta. Sementara *syirkah ‘uqud* adalah perkongsian dalam transaksi.²⁷

Syirkah amlak ada dua macam, yaitu *syirkah amlak ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *syirkah amlak ijbari* (perkongsian paksa). Perkongsian sukarela adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Contohnya dua orang yang bersepakat untuk membeli suatu barang, misalnya satu buah mobil truk untuk angkutan barang sementara perkongsian yang bersifat memaksa adalah perkongsian di mana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau

²⁷ *Ibid, h, 130*

suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut, karena memang sudah menjadi ketentuan hukum. Misalnya dalam hal bagian harta waris bagi saudara orang yang mewariskan, apabila jumlah saudara lebih dari satu orang, maka mereka secara *ijbari* berkongsi mendapatkan seperenam. Artinya seperenam harta warisan dibagi sejumlah saudara yang ada.

1. *Syirkah 'Uqud dan Pembagiannya*

Syirkah 'uqud adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa dan pembagian keuntungannya. Menurut kalangan Hanbaliyah, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujud* dan *syirkah mudarabah*.²⁸

Macam-macam *syirkah* jenis ini, lebih mudah dikenali. Karena merupakan kerjasama atau berserikatnya dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keuntungan, dan kerugian. Pengusaha yang mencari investor untuk modal usaha atau investor yang ingin melakukan kerjasama usaha bagi hasil menerapkan beberapa jenis *syirkah uqud* untuk menjalankan suatu usaha secara bersama-sama.

Berikut ini adalah macam-macam *syirkah uqud* dan contohnya:

²⁸ *Ibid*, h 130-131

a. Syirkah' inan

Syirkah inan adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dengan ketentuan setiap pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi kerja (amal) dan modal (maal). Al-Quran surat Shaad ayat 24, merupakan dalil *syirkah' inan*.

Modal uang dan kerja merupakan dua point penting dalam *syirkah' inan*. Sehingga, apabila salah satu pihak, bergabung dengan membawa modal barang ('*urudh*'), maka barang tersebut harus ditaksir harganya senilai uang.

Macam-macam *syirkah* inilah sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, praktek *syirkah' inan* tidak mengharuskan adanya kontribusi modal, kerja, dan tanggung jawab dalam jumlah yang sama antara pihak yang bekerjasama. Selain itu, juga memungkinkan dilakukannya pendelegasian wewenang kerja kepada salah satu pihak.

Contoh *syirkah' inan* dapat ditemukan dalam contoh akad musyarakah dalam kehidupan sehari-hari. Misal, Peternak lele mengajak investor untuk kerjasama memproduksi 50 Kg lele selama 6 bulan. Sesuai kesepakatan peternak lele dan investor sama-sama menyetorkan modal Rp. 20 Juta. Dan pembagian nisbah keuntungan sebesar 30% bagi investor dan 70% bagi peternak lele. Dengan ketentuan, peternak lele sebagai pengelola usaha, lebih banyak bekerja dibandingkan investor.²⁹

²⁹ *Ibid*, 131-132

b. Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah kerjasama usaha antar para pihak yang hanya menyertakan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*maal*). Kontribusi kerja yang dimasukkan kedalam *syirkah* dapat berupa kerja fisik, maupun kerja pikiran. Tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktek *syirkah abdan*. Sehingga dimungkinkan kerjasama *syirkah abdan* antara pihak yang menyumbang kerja pikiran dan satu pihak lagi kerja fisik.³⁰

Para pihak yang berkongsi dalam *syirkah* absan harus mempunyai keterampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam *syirkah* adalah keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan dalam *syirkah abdan* akan mempunyai nilai ekonomi atau dihargai apabila pekerjaan tersebut dapat terukur, baik berdasarkan durasi waktu maupun dari sisi hasil. Dalam hal ini pasal 148 KHES menyebutkan:

1. Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
2. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.

Pasal 150 menyebutkan:

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 125.

1. Suatu akad kerja sama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
2. Pembagian tugas dalam akad kerja-sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Masing-masing pihak dalam *syirkah abdan* dapat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka untuk membagi pekerjaan yang menjadi objek perkongsian. Pembagian pekerjaan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan pihak yang ikut serta dalam perkongsian semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam *syirkah abdan* harus diketahui oleh para pihak yang berkongsi. Pembagian tugas atau pekerjaan diantara anggota tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan keahlian. Oleh karena itu, upah atau keuntungan dalam *syirkah abdan* tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume dan proporsi kerja.

Contoh *syirkah abdan* dalam kehidupan sehari-hari adalah dua orang nelayan yang sama-sama pergi melaut dalam sebuah perahu. Sebelum melaut mereka menyepakati bagi hasil atas keuntungan pendapatan hasil tangkapan mereka. contoh lain *syirkah abdan* adalah kerjasama usaha antara seorang arsitek dan tukang bangunan dalam mengerjakan proyek pembangunan rumah.

c. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (amal). Disebut *syirkah wujud* karena para pihak yang melakukan *syirkah* ini memiliki reputasi baik dan keahlian dalam berbisnis.³¹

Syirkah jenis disebut dengan *syirkah wujud* karena yang menjadi modal adalah reputasi para pihak yang berserikat. Reputasi kejujuran dan integritas mereka dalam bekerja. Suatu barang yang dijual dengan harga tangguh tidak akan mungkin kecuali tanpa jaminan, baik berupa jaminan maupun reputasi seseorang.

Para pihak ini membeli barang dengan pembayaran tunda kepada pemilik barang, kemudian menjual kembali secara tunai. Mereka dapat melakukan hal tersebut, karena memiliki reputasi baik sehingga dipercaya baik oleh pemilik barang, maupun masyarakat calon pembeli. Terkadang para pihak juga memperoleh 100% modal dari shahibul maal. Sehingga, contoh *syirkah wujud* ini sangat mirip dengan *syirkah mudharabah*.

Kalangan Hanafiyah memperbolehkan *syirkah wujud*. Hal ini berbeda dengan kalangan Syafi'iyah yang tidak memperbolehkan *syirkah* jenis ini. Argumentasi kalangan Hanafiyah adalah karena masyarakat sudah melakukan praktik *syirkah wujud* ini diberbagai wilayah, sementara argumentasi kalangan Syafi'iyah tidak memperbolehkan *syirkah* ini adalah karena tidak adanya

³¹ *Ibid*, h, 126-127

percampuran kepemilikannantara pihak atau anggota perkongsian. Masing-masing pihak bertanggung jaab atas barang yang dibelinya secara tangguh tersebut, dan apabila mendapat keuntungan juga untuknya.³²

d. *Syirkah Mufawadah*

Pada prakteknya, *syirkah inan*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud*, dapat digabungkan dalam satu *syirkah*, *syirkah* yang mengabungkan macam-macam *syirkah uqud* lainnya dikenal dengan nama *syirkah mufawadah*. *Syirkah mufawadah* diperbolehkan, karena setiap jenis *syirkah* yang telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah* adalah *syirkah* yang sah, apabila digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya. Adapun pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan ketentuan masing-masing *syirkah* lainnya.

Syirkah mufawadah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama, mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan iintensitas kerja yang sama, resiko ditanggung bersama dan pembagian modal juga harus sama.

KHES Pasal 165 menyebutkan bahwa *syirkah mufawadah* adalah sebagai berikut:

³² Ibid, h, 127-128

”Kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama”³³

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, dapat dipahami bahwa dalam *syirkah mufawadah* semua pihak yang berkongsi harus terlibat dalam perkongsian secara proporsional dan harus relatif sama. Masalah modal, para pihak harus menyerahkan modal sesuai dengan kesepakatan dan proporsi yang sama. Risiko dan keuntungan harus ditanggung secara bersama dengan proporsi yang sama. Hanya saja apabila terjadi kerugian akibat kelalaian salah seorang pihak maka pihak tersebut yang menanggung kerugian.

Contoh *syirkah mufawadaah* adalah seorang investor melakukan *syirkah mudharabah* dengan dua orang ahli teknik sipil untuk usaha properti. Dua orang ahli teknik sipil ini juga melakukan *syirkah abdan*, untuk mengerjakan proyek. Mereka juga melakukan *syirkah wujuh* dengan pemilik toko bangunan.³⁴

D. Syarat dan Rukun Syirkah

Mengenai syarat dan rukun *syirkah* masih diperselisihkan oleh para ulama. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut ulama Hanafiyah dapat dibagi pada empat bagian:

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat;

³³ *Ibid*, h. 128-129

³⁴ *Ibid*, h 130-131

- a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,
 - b. yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
- a. bahwa modal yang dijadikan obyek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti uang,
 - b. yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan
- a. modal (pokok harta) dalam *syirkah muwafadhah* harus sama
 - b. bagi yang *bersyirkah* ahli untuk *kafalah*,
 - c. bagi yang dijadikan obyek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. yang bertalian dengan *syirkah inan*, sama dengan syarat syarat *syirkah mufawadhah*.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar (*rusyd*). Sementara ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa

syirkah yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya adalah batal.³⁵

Sedangkan syarat-syaratnya adalah;

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat itu saling percaya mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Sedangkan mengenai rukun-rukunnya, ulama Hanafiah menggariskan bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul, sebab dengan ijab-qabul (akad) itulah *syirkah* ditentukan adanya. Adapun yang lainnya seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta adalah di luar pembahasan akad sebagaimana jual beli. Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan obyek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa mengenai syarat dan rukun *syirkah* masih terjadi silang pendapat di kalangan ulama yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi terhadap bentuk-bentuk *syirkah*. Namun demikian, secara umum syarat dan rukun *syirkah* terkait dengan

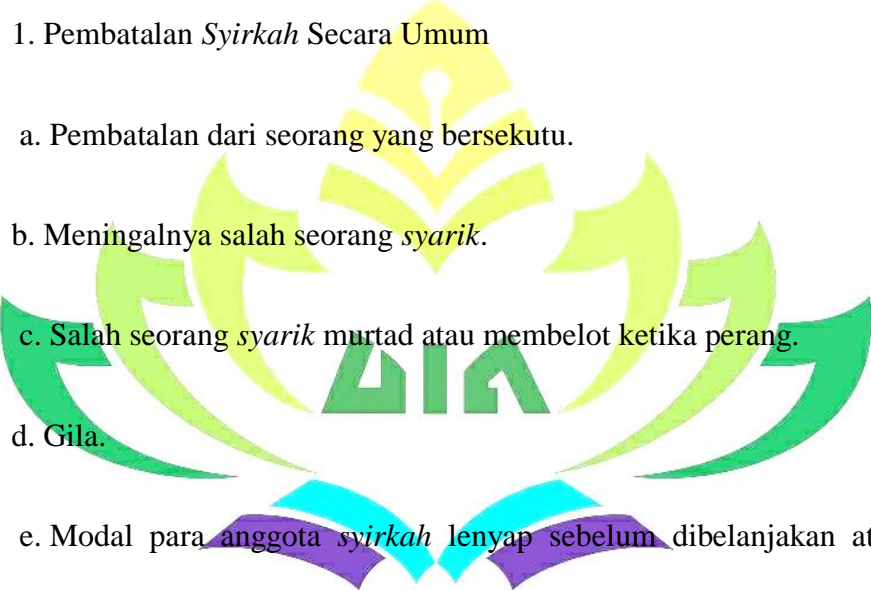
³⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar alFikr, t.th), hal. 83

harta ataupun obyek yang dijadikan *syirkah* dan pelakunya (orang yang berakad *syirkah*).³⁶

E. Berakhirnya *Syirkah*

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal, yaitu:

1. Pembatalan *Syirkah* Secara Umum

- 
- a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
 - b. Meningalnya salah seorang *syarik*.
 - c. Salah seorang *syarik* murtad atau membelot ketika perang.
 - d. Gila.
 - e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

2. Pembatalan *Syirkah* Secara Khusus

- a. Harta *syirkah* rusak.

³⁶ Ibid, hal. 84

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*.³⁷

F. Berakhirnya Akad *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut. Yaitu:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber *Tasharruf* (Keahlian mengelola harta) , baik karena gila ataupun alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanya yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus kepada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia 2001), h, 201.

anggota yang meninggal menghendaki turutserta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru sebagai ahli waris yang bersangkutan.

4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karna boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada harta sisa, *syirkah* masih bisa berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.³⁸

³⁸ *Ibid.*, H. 202.

B. Perjanjian Dalam Islam

Perjanjian dalam islam termasuk kajian *Fiqh Muamalah* , kata *Muamalah* secara bahasa sama dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara singkat, Fiqh Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.³⁹ Kajian fiqh muamalah adalah aspek hukum islam yang ruang lingkupnya luas. Pada dasarnya aspek hukum islam yang bukan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji digolongkan muamalah. Karena itu masalah pidana dan perdata digolongkan hukum muamalah. Namun diperkembangan selanjutnya hukum islam dibidang muamalah dapat dibagi menjadi dua garis besar secara umum yakni munakahat dan jinayat. Sementara itu muamalah dalam arti yang lebih sempit atau dalam arti yang khusus hanya membahas tentang hukum ekonomi dan bisnis islam.⁴⁰

Pengertian muamalah secara khusus dibahas sebagai transaksi-transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, transaksi-transaksi tersebut dipelajari dari sudut pandang fiqh muamalah. Sehingga semua transaksi dapat ditentukan hukumnya apakah halal atau haram. Fiqh

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. Vii.

⁴⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (yogyakarta TERAS, 2001), h. 1.

muamalah membahas banyak sekali transaksi yang salah satunya membahas transaksi secara umum atau biasa disebut akad. Dalam akad banyak sekali rukun dan syarat akad agar akad dapat dikatakan sah dan menghasilkan produk hukum yang halal. Dalam memenuhi produk hukum yang halal, maka rukun dan syarat tersebut tentunya harus terpenuhi setiap melakukan kegiatan transaksi. Akad adalah suatu penentu, suatu parameter yang menyebabkan suatu kegiatan transaksi itu sah, karena secara keseluruhan transaksi-transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari akad.

1. Pengertian Akad

Salah satu prinsip muamalah adalah *'an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.⁴¹

Akad (Arab: ُذَقَانِع = (perikatan, perjanjian dan permufakatan), Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam. Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

⁴¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cetakan Kesatu, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 45.

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Alqur'an:

الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنْ وَاتَّقَىٰ بَعْدَهُ ۚ أَوفَىٰ مَنْ بَلَىٰ

Artinya: “*sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”.

(Q.S.Ali-Imran 3:76)

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.*

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya

(QS. AlMaidah:1)”

Akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang

muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, wakalah, dan gadai. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴² Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran\pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁴³

2. Rukun Dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja yang dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.⁴⁴

- a. *'aqid* ialah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maqudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 72.

⁴³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 35.

⁴⁴ Hendi Suhendi, Op. Cit. h. 46.

diberi ganti. Tujuan akad hibah adalah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*).⁴⁵

- d. Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok i'arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- e. *Sighat Al'Aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakat sebagai gambaran khendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakat pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.⁴⁶

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sighat Al'Aqd* ialah :

- a. *Sighat Al'Aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karna ancaman atau ditakuti oleh orang lain, karena dalam tijarah harus saling ridha.

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada 2 macam :

⁴⁵ *Ibid.*, h. 47

⁴⁶ *Ibid.*

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

1. Kedua orang yang melakukan cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukann oleh orang yang mempunyai hak melakukan nya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang,
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak lah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dijabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijab nya sebelum kabul, maka batal lah ijab nya.

7. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁴⁷

3. Macam-Macam Akad

A. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu:

1. *Akad sah*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b. Akad *mawaquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan dan melangaukan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz. Dalam kasus

⁴⁷ *Ibid.*, h. 49-50.

seperti ini akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil itu.⁴⁸

B. Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (*perwalian*) *al-'ariyah* (*pinjam-meminjam*), dan *al-wadi'ah* (*barang titipan*).

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi oleh para ulama fiqh menjadi tiga macam, yaitu :

- a) Akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan, termasuk akad perkawinan yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan syara', seperti melalui talak dan *al-khulu'* (*tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi*)
- b) Akad yang mengikat, tetapi bisa dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, perdamaian *al-muzara'ah* (*kerja sama dalam pertanian*), dan *al-musaqah* (*kerja sama dalam perkebunan*). Dalam akad-akad seperti ini berlaku hak *khiyar* (*hak*

⁴⁸ Nasrun Haroen, Op. Cit. h. 106.

memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).

- c) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak berakad, seperti akad *ar-rahn* dan *al-kafalah*.

2. *Akad yang tidak sah*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasad. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Sedangkan akad fasid, menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan type, jenis, dan bentuk rumah yang dijual atau tidak disebutkan *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dengan pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah fasid dan jual beli ini bisa dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan, misalnya dengan

menjelaskan type, jenis, dan bentuk rumah yang dijual atau menjelaskan *brand* dan jenis kendaraan yang dijual.⁴⁹

C. Dilihat dari segi penamaannya, para ulama fiqh membagi akad kepada dua macam, yaitu:

1. *Al-'uqud al-musammah* (akad bernama), yaitu akad-akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Para *fuqaha* tidak sepakat tentang jumlah akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan sistematis tentang urutan-urutan akad itu. Bila kita mengambil al-kasani (w.587/1190) sebagai contoh dalam karya fiqhnya, kita dapat akad bernama itu meliputi sebagai berikut :
 - 1) Sewa menyewa (*al-ijarah*)
 - 2) Pemesanan (*al-istishna*)
 - 3) Jual beli (*al-bai'*)
 - 4) Penanggungan (*al-kafalah*)
 - 5) Pemindahan utang (*al-hiwalah*)
 - 6) Pemberian kuasa (*al-wakalah*)
 - 7) Perdamaian (*ash-shulh*)
 - 8) Persekutuan (*asy-syirkah*)
 - 9) Bagi hasil (*al-mudharabah*)
 - 10) Hibah (*al-hibah*)

⁴⁹ *Ibid.*, h. 108.

- 11) Gadai (*ar-rahn*)
- 12) Penggarapan tanah (*al-muzara'ah*)
- 13) Pemeliharaan tanaman (*al-muamalah/al-musaqah*)
- 14) Penitipan (*al-wadi'ah*)
- 15) Pinjam pakai (*al-'ariyah*)
- 16) Pembagian (*al-qismah*)
- 17) Wasiat-wasiat (*al-washaya*)
- 18) Perutangan (*al-qardh*)

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-fiqh al-Islami wa Adillstuh* menyebutkan 13 akad bernama. Hanya saja ia kurang konsisten karena memasukkan *jualah* (janji memberi hadiah/imbalan) yang merupakan kehendak sepihak dalam daftar akad yang ia kemukakan. Padahal ia sendiri menegaskan bahwa yang ia maksud dengan akad dalam pembahasan tentang asas-asas umum akad adalah tindakan hukum berdasarkan kehendak dua pihak., dan menyatakan *jualah* sebagai kehendak sepihak. Kedu belas akad bernama dimaksud adalah :

- 1) Sewa menyewa (*al-ijarah*)
- 2) Jual beli (*al-bai'*)
- 3) Penanggungan (*al-kafalah*)
- 4) *Jualah* (*al-jualah*, sayembara)
- 5) Pinjam mengganti (*al-qardh*)
- 6) Pemindahan utang (*al-hiwalah*)
- 7) Pemberian kuasa (*al-wakalah*)

8) Perdamaian (*ash-shulh*)

9) Persekutuan (*asy-syirkah*)

10) Gadai (*ar-rahn*)

11) Penitipan (*al-wadi'ah*)

12) Pinjam pakai (*al-'ariyah*)

2. *Al-'uqud ghair al-musammah*, yaitu akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna'*, *bai' al-waafa'*.

D. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua macam, yaitu :

1) Akad *tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari "*return*" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, *Ibra'mm* Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn , dan *Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transtaction* (transaksi nirlaba) transaksi ini pada haikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.⁵⁰

2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapat keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, dan *Ijarah Muntahiya bittamlik* serta

⁵⁰ Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 260.

mudharabah dan Musyarakah. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.

E. Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi:

- 1) Akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung pada suatu hal lain. termasuk kedalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.
- 2) Akad *asesoir* (*al-'aqd at-tabi'i*) adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk kedalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-kafaalh*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak sah apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi, “*suatu yang mrngikut*” (*at-tabi' tabi*). Artinya perjanjian *asesoir* ini yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut. Termasuk kedalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada.

Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum islam yang berbunyi, “*suatu yang mengikuti*” (*at-tabi’ tabi*). Artinya perjanjian *asesoir* ini yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.

F. Akad dari segi unsur tempo didalam akad, dapat dibagi menjadi akad bertempo (*al-aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al-aqd al-fauri*)

1) Akad bertempo adalah akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya adalah akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah, dan lain-lain. dalam akad sewa menyewa, misalnya termasuk bagian dari isi perjanjian adalah lamanya masa sewa yang ikut menentukan besar kecilnya nilai akad. Tidaklah mungkin suatu akad sewa-menyewa terjadi tanpa adanya unsur lamanya waktu dalam masa persewaan berlangsung.

2) Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli misalnya, dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.

G. Akad dari segi formalitasnya, dibedakan menjadi akad konsensual (*al-aqd ar-radha'i*), akad formalitas (*al-aqd asy-syakli*), dan akad riil (*al-aqd al-'aini*).

- 1) Akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Meskipun kadang-kadang dipersyaratkan adanya formalitas tertentu, seperti harus menulis, hal tersebut tidak mengalami keabsahan akad tersebut, dan tetap dianggap akad konsensual. Tulisan hanyalah suatu syarat yang diperlukan untuk pembuktian. Kebanyakan akad dalam hukum islam adalah akad konsensual seperti jual beli , sewa menyewa dan utang piutang.
- 2) Akad formalitas adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah. Contohnya adalah akad diluar lapangan hukum harta kekayaan, yaitu akad nikah di mana di antara formalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi.
- 3) Akad *riil* adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Ada lima macam akad yang termasuk dalam kategori jenis akad ini, yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang), dan akad gadai. Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah hukum Islam yang menyatakan

“(tabaru’ (donasi) baru terjadi dengan pelaksanaan riil” (la yatimmu at-tabarru’ illa bo qabdh).

H. Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi menjadi dua, yaitu:

1. ‘*Aqd adh-dhaman* adalah akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.
2. ‘*Aqd al-‘amanah* adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah ditangan penerima barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, akad pinjaman, perwakilan (pemberi kuasa).⁵¹

Adapun akad bersifat ganda adalah akad yang disatu sisi merupakan akad tanggungan, tetapi disisi lain merupakan akad amanah (kepercayaan). Misalnya akad sewa menyewa dimana barang yang disewa merupakan amanah ditangan penyewa, akan tetapi disisi lain manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya setelah diterima tanpa ia manfaatkan, maka manfaat barang yang tidak dinikmatinya adalah atas tanggungannya. Ia wajib membayar uang sewa kepada orang yang menyewakan.

⁵¹ Ibid, h, 110

4. Asas-Asas Akad

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi, fundamen (alas dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental, dan prinsip.⁵² Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Ada tujuh asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis.⁵³ Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas *tauhid*. Asas *ilahiyyah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.⁵⁴

1. Asas Ilahiah

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 70.

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 249.

⁵⁴ A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2004), h. 125-126.

Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang) ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang haram, memonopoli uang rakyat, korupsi, mencuri, berjudi, ataupun melakukan suap menyuap. Ia menjauhi daerah yang diharamkan Allah, dan meninggalkan daerah syubhat.⁵⁵

Asas *ilahiah*, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid rububiyah*. *Tauhid uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesaddaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.

2. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad), pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.32.

sah.⁵⁶ Landasan asas ini yakni Qs. *Al-Baqarah*/2: 256; *Al-Maidah*/5: 1; *Al-Hijr*/15 29; *Ar-Ruum*/30: 95; *An-Nisaa*’/4: 33.

Dalam bidang muamalah ini terdapat kaidah fiqh yang berisikan bahwa *”asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”* Kaidah ini bersumber pada dua Hadis Nabi Muhammad SAW, berikut ini:

- a. *“apa-apa yang dihalalkan adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa yang dimafkan, maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatu pun”.*
(HR. Al-Bazar dan Al-Thabrani)
- b. *“sesungguhnya Allah tidak mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia; dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kau pertengkarkan dia; dan Allah telah mendiadakan beberapa hal sebagai tanda kasih-Nya kepadamu, dan dia tidak lupa, maka janganlah kau perbincangkan dia.*

Isi kaidah fiqh tersebut menunjukkan, bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalah, tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadah. Kebolehan di bidang muamalah ini dapat terlihat dari Hadis Rasulullah bahwa *“kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu”*. Adapun di bidang

⁵⁶ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Jawa Timur: Banyumedia Publishing, 2005), h. 238.

ibadah dapat dilihat dalam surag *Asy-Syuura (42): 21*, yang terjemahannya adalah “*apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariaatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?*”.

3. Asas Persamaan atau Kesenjangan (Al-Musawah)

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.⁵⁷ Seperti yang tercantum dalam QS. *An-Nahl (16): 71*, “Dan bahwa Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki”. Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dalam QS. *Al-Hujurat (49):13*,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁵⁷ Rahmani Timorita Yuliant, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah*, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. II, Nomor 1 (Juli, 2008), h. 97.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.”

4. Asas Keadilan (Al-‘Adalah)

Dalam QS. *Al-Hadid* (57): 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman: *“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”*.

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur’an. Bersikap adil seringkali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia menjadi lebih dekat kepada takwa. Dalam QS. *Al-Araaf* (7): 29, disebutkan bahwa “*Katakanlah: “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”*”. Dan, dalam QS. *Al-Maaidah* (5): 8, disebutkan berikut ini :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۖ لِلّٰهِ شُهَدَآءُ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۚ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan “.

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaa. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan diantara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.⁵⁸ Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 177 berikut ini.

“.....Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Dan juga dalam QS. *Al-Mu'minuun* (23): 8-11 berikut ini.

“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikunya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (ya'ni) yang akan mewarisi surga firdaus. Mereka kekal didalamnya”.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, cet. 1, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h.396.

Dalam QS. *An-Nahl* (16): 90, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”.

Sikap adil harus tercemin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman.

Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim lainnya. Riba adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti yang tercantum dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 275, bahwa *“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. Yusuf Qardhawi berpendapat sebagai berikut.

“Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapatkan risiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan

mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi penghasilan materi.”

Mereka yang menakar atau menimbang dengan tidak adil mendapat ancaman dari Allah SWT seperti yang tercantum dalam QS. *Al-Muthaffiin* (83): 1-6 berikut ini.⁵⁹

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

1. “1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
5. Pada suatu hari yang besar,
6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”.

Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan zalim pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Dalam

⁵⁹ Ibid, h 396-397

dua Hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini terlihat bahwa Allah tidak menyukai atas perbuatan ini.

- a. HR. Jemaah dari Abu Hurairah

“Penangguhan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman”

- b. HR. Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad.

“Mengundur-undur pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah menghalalkan harga (dirinya untuk dihinakan) dan hukuman kepadanya”.

5. Asas Kerelaan (Al-Ridho)

Dalam QS. *An-Nisaa* (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*). Berikut isi dari QS. *An-Nisaa*’ (4) 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dalam QS. *Al-Ahzab* (33): 70, disebutkan bahwa *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar.”* Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW *“Tidak dibenarkan seorang Muslim menjual barang yang cacat (rusak), kecuali ia menjelaskan kerusakannya* (HR. Al-Quzwaini), dan dalam Hadis lain *“Barangsiapa yang menipu kami, ia bukan kelompok kami.”* (HR. At-Turmuzi, dan Abu Daud).⁶⁰

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi

⁶⁰ Ibid, h. 397-398

masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

Dalam QS. *Al-israa'* (17): 27, Allah SWT berfirman :
“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”

Pemborosan adalah suatu hal yang menya-nyiakan harta yang membuat harta tersebut menjadi tidak bermanfaat. Akibatnya, pemborosan ini dapat memberikan mudarat kepada yang melakukannya.

7. Asas Tertulis (Al-Kitabah)

Dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tukisan, saksi, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁶¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut :

⁶¹ Ibid, h, 398-399

1. *Ikhtiyari*/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak , terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dalam satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji. Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
3. *Ikhtiyati* / kehati-hatian. Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan tepat dan cermat.
4. *Luzum* / tidak berubah. Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari spekulasi atau maisir.
5. Saling menguntungkan. Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah* / kesetaraan. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi. Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan. Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9. *Taisir* / kemudahan. Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Itikad baik. Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁶²

4. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dengan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.

⁶² Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), h.43.

3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadis Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual po seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjaddi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak dapat izin pihak berwenang.
7. Karena kematian.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Praktek Bisnis Periklanan *Adsensecamp*

Dalam dunia internet dan sosial media memungkinkan munculnya gelombang informasi yang tidak terbatas. Dalam bidang bisnis dunia internet sangat bermanfaat dan memberikan keuntungan serta kesempatan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tambahan dari manapun termasuk dari luar negeri. Dijaman yang sangat canggih sekarang ini, kita dapat memasang iklan di website yang dapat menghasilkan keuntungan dan memberi kita tambahan uang.

Dalam dunia internet banyak program dan aplikasi yang dapat menghasilkan uang dari internet, yang sedang populer sekarang dan terbukti dapat menghasilkan uang adalah *Adsensecamp*.

Adsensecamp adalah salah satu pelopor layanan *adsense* di Indonesia. Merupakan agen periklanan online yang menggunakan sistem PPC (pay per click) dimana publisher (pemilik website¹) akan mendapatkan uang dari *Adsensecamp* jika pengunjung website mengklik iklan atau link iklan yang ditampilkan pada situs atau website nya. Biasanya publisher akan mendapatkan bayaran dengan kisaran Rp 300/klik. Uang tersebut akan tersimpan otomatis di akun *adsensecamp*, dan akan bisa dicairkan jika sudah mencapai minimal pembayaran. Untuk sekarang minimum pembayaran *adsensecamp* adalah Rp 100.000. jika balance uang yang tersimpan di *adsensecamp* sudah mencapai

minium pembayaran tersebut, uang bias ditransfer ke rekening bank pemasang iklan.

Bisnis internet dengan program penyedia iklan saat ini sedang populer karena dengan prosedur yang mudah dan bebas biaya dapat menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Bisnis ini diikuti oleh masyarakat di seluruh dunia tak terkecuali masyarakat muslim. Para publisher akan berlomba-lomba untuk memperbanyak postinga-an iklan (materi) dan menghias websitenya semenarik mungkin agar dikunjungi banyak pengguna internet, sehingga peluang untuk mendapatkan komisi yang besar dari klik pengunjung pada link iklan akan semakin besar.⁶³

B. Cara Mengikuti Adsensecamp

Menurut wawancara yang saya lakukan hari jumat 5 juli 2019 pada Aldina Yansmil yaitu salah satu pemilik website, awal mula sebelum bergabung dengan *adsensecamp* adalah kita diharuskan memiliki sebuah website sendiri karena website merupakan tempat dimana iklan-iklan yang dipasang akan muncul. Untuk mengikuti program pada *adsensecamp* , sebagai web owner (pemilik website) harus melakukan pendaftaran dimana nantinya setelah terdaftar baru bisa melakukan copy paste code yang diberikan pihad *adsensecamp*. Kemudian pasang kode tersebut pada website yang didaftarkan.

1. Masuk ke situs *Adsensecamp* atau klik banner *Adsensecamp* diatas.
2. Pilih opsi *Web Owner* dan klik *Create Publisher Account*.

⁶³ <https://adsensecamp.com>. Tanggal akses 7 juli 2019.

3. Pada langkah selanjutnya, silakan isi form registrasi dengan data-data seperti nama dan alamat dengan lengkap dan benar. Centang kotak persetujuan dan klik next.
4. Akan muncul halaman registrasi update. Klik registrasi jika ingin follow dan mendapatkan info dari Twitter @adsensecampcom, atau klik Skip untuk lewati.
5. Registrasi sukses, *Adsesnsecamp* telah mengirimkan e-mail verifikasi ke akun e-mail. Maka, silakan cek inbox pada akun e-mail anda. Akan ada e-mail dari *Adsensecamp*, lalu klik link yang diberikan untuk verifikasi.
6. Dengan link tersebut maka nanti akan diarahkan ke halaman yang menampilkan bahwa keterangan pendaftaran di *Adsensecamp* telah berhasil. Klik pada tulisan "klik disini" untuk melakukan login ke member area.
7. Setelah itu nanti akan diarahkan ke form login. Silakan login dengan akun yang baru di buat pada *Existing Member Blogger*.
8. Sekarang website tersebut telah berhasil membuat akun *Adsensecamp* dan login pada akun tersebut. Sekarang hanya tinggal memasang iklanya pada blog atau website untuk mendapatkan "*Pay Per Click*". Sebelum menerbitkan iklan, terlebih dahulu harus membuat channel iklan yaitu website sebagai channel penerbit iklan dari *Adsensecamp*. Pada menu "*Publisher*" silakan klik *manage channel*, dan klik tulisan "klik disini" untuk menambah channel baru.

9. Pada bagian selanjutnya, silakan isi formulir tambah channel Iklan. Isi dan pilih data-data yang diminta, serta berikan centang pada data yang dibutuhkan. Lalu klik Save.
10. akan muncul keterangan bahwa penambahan Channel Iklan telah berhasil. Klik "dapatkan kode html iklan" untuk mendapatkan kode html/script iklan yang akan diterbitkan di blog tersebut.
11. Pada tahap ini, silakan nanti mengatur tampilan iklan seperti ukuran dan warna. Centang pada "menampilkan iklan image" jika akan menampilkan iklan image. Setelah selesai, klik pilih tampilan iklan ini.
12. Kini pemilik website telah mendapatkan kode html iklanya. Silakan copy kode yang diberikan dan terapkan di blog tersebut.

Jika iklan berhasil ditampilkan pada Website, maka anda telah melakukan konfigurasi dengan benar. Kini anda tinggal melanjutkan kegiatan Blogging anda dengan membuat konten sambil duduk manis. Pada 11 pemilik website yang saya wawancarai juga ternyata sama dalam cara mengikuti website harus menggunakan langkah-langkah yang disebutkan diatas.

C. Cara Kerja *Adsensecamp*

Seperti halnya website periklanan pada umumnya tentu ada beberapa syarat-syarat untuk bergabung, sama halnya dengan *Adsensecamp* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *web owners* sebelum bergabung atau sering disebut *Terms Of Services* (TOS) yang berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dan cara kerja pada *Adsensecamp* :

1. Web Owners setuju menyediakan space pada websitenya untuk digunakan oleh *Advertisers* dalam melakukan sistem periklanan yang disediakan oleh *Adsensecamp*.
2. Web Owners akan menerima pembayaran dari *Adsensecamp* setiap tanggal 5-15 pada tiap bulannya.
3. Pembayaran akan ditransfer melalui rekening bank anda apabila telah memiliki saldo pendapatan minimal Rp. 100.000 atau sesuai minimum payment yang anda inginkan.
4. Web owners disarankan menggunakan rekening bank BCA, BNI, Mandiri atau Paypal karena pembayaran dari AdsenseCamp menggunakan rekening bank tersebut.
5. Untuk setiap klik valid yang dihasilkan pada iklan teks, web owners akan mendapatkan Rp 300,- (tiga ratus rupiah).
6. Untuk setiap klik valid yang dihasilkan pada iklan gambar, web owners akan mendapatkan Rp 400,- (empat ratus rupiah).
7. Jumlah iklan per halaman dalam satu blog maksimal adalah 3 (tiga) buah.
8. Jumlah Channel per akun maksimal adalah 10 (sepuluh) buah.
9. Web owner dilarang mensetting iklan *Adsensecamp* dengan menggunakan tanda-tanda tertentu dengan tujuan agar pengunjung web mengklik pada iklan tersebut.
10. Web owner dilarang memberikan perintah atau saran bagi pengunjung untuk mengklik iklan *Adsensecamp*.

11. web owner dilarang mengaburkan atau membuat iklan yang tampil dari *Adsensecamp* menjadi kurang jelas untuk dibaca.
12. Web owner dilarang melakukan klik sendiri pada iklan *Adsensecamp*.
13. Web owner dilarang melakukan pasang lepas script iklan *Adsensecamp* di blog yang terdaftar di channel dalam masa satu bulan. Apabila pada saat pengecekan oleh admin terjadi pelepasan iklan, maka akun akan di *suspend*.
14. Content web atau blog tidak boleh ditempatkan pada halaman yang khusus untuk menampilkan iklan.
15. Web owner dilarang memasang iklan yang terintegrasi dengan aplikasi software apapun, termasuk toolbar.
16. Web owner dilarang memasang tampilan iklan pada pop-up ataupun pop-under.
17. Web owner dilarang memasang iklan yang bergerak mengikuti scrollbar.
18. Web owner dilarang menggunakan background iklan dalam bentuk transparan.
19. Web owner dilarang memasang iklan yang bergerak mengikuti mouse.
20. Web owner dilarang memasang iklan dalam bentuk *floating script* (iklan diam meskipun scrollbar digerakkan).

21. Web owner dilarang memasang iklan dengan menyembunyikan logo *AdsenseCamp* yang ada pada script iklan tersebut.⁶⁴

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan hari senin 8 juli 2019 pada intan fatrisia alse dan 30 pengguna website atau blog lainnya ketika dia membuka suatu blog atau website akan selalu muncul suatu iklan, iklan tersebut yang dinamakan *adsensecamp*. Iklan itu kadang sedikit mengganggu pengguna web atau blog ketika mengakses blog tersebut untuk dibaca karena kadang iklan muncul dengan sendirinya dan menghalangi tulisan pada blog atau web tersebut sehingga pengguna web harus meng klik iklan tersebut agar hilang dan dapat melanjutkan membaca blog atau web yang sedang diakses.

D. Cara Pembayaran *Adsensecamp*

Pembayaran akan diterima berdasarkan jumlah klik pada iklan yang terpasang pada situs web *publisher* jumlah klik. Pembayaran akan dilakukan apabila penghasilan *publisher* telah mencapai ambang pembayaran, selama tidak ada penangguhan aku dan *publisher* mematuhi kebijakan program *adsensecamp*. Namun, cek atau transfer bank tidak dapat dilakukan pada akhir bulan karena pihak *adsensecamp* harus memvalidasi keakuratan penghasilan terlebih dahulu, proses yang berlangsung pada minggu pertama setiap bulsn berdasarkan penghasilan bulan sebelumnya. Pihak *adsensecamp* akan melakukan pengiriman pembayaran beberapa minggu kemudian, biasanya pada minggu terakhir

⁶⁴ <http://sipakainga.blogspot.com/2015/05/syarat-syarat-sebagai-publisers-adsensecamp.html>. Tanggal akses 7 juli 2019

bulan tersebut. Jika saldo belum mencapai ambang pembayaran pada akhir bulan, pihak *adsensecamp* akan menggulirkan penghasilan ke bulan berikutnya hingga ambang pembayaran dicapai. Saldo mencapai total penghasilan gabungan untuk semua produk iklan *adsensecamp*.

Apabila *publisher* sudah mendapatkan uang 100\$ maka ia akan mendapat cek, umumnya di Indonesia pencairan cek dapat dilakukan menggunakan *Western Union*, *Standart check* atau menggunakan Bank. Berikut ini adalah keterangan dari ketiga cara tersebut :

1. Melalui *Westen Union*

Metode pembayaran *adsensecamp* yang paling umum digunakan khususnya di Indonesia, yaitu dengan menggunakan *Westen Union*. Jika penghasilan dalam akun *adsensecamp* sudah mencapai 100\$ atau lebih maka pada akhir bulan nantinya akan muncul informasi pembayaran *adsensecamp* yang dapat dicairkan di *Westen Union*.

2. Melalui Rekening Bank Lokal

Pihak *adsensecamp* sekarang sudah mendukung pengiriman penghasilan *adsensecamp* melalui rekening yang dimiliki *publisher*.

3. Melalui *Standart Check*

Cara yang selanjutnya yaitu menggunakan cek standar, nantinya saat penghasilan *adsensecamp* yang sudah mencapai *payment threshold* maka pihak *adsensecamp* akan mengirim cek ke alamat rumah

publisher , kemudian cek tersebut dapat dicairkan di bank yang dimiliki *publisher*.⁶⁵



⁶⁵ Pembayaran Adsense, tersedia di: “Informasi Tentang Cara Pembayaran Google Adsense”, <http://pembayaranadsense.blogspot.co.id/2013/12/Pembayaran-adsense.html?m=1> Tanggal Akses 6 juli 2019.

BAB IV

ANALISIS

A. Praktek Sistem Bisnis Periklanan *Adsensecamp*

Bisnis periklanan *adsensecamp* adalah salah satu pelopor layanan *adsense* di Indonesia. Melalui bisnis periklanan *adsensecamp* ini pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang akan ditentukan iklan dan materinya oleh pihak *adsensecamp* di halaman web mereka.

Terdapat dua pihak dalam bisnis *adsensecamp* yaitu, pihak *publisher* dan pihak *adsensecamp*, *publisher* merupakan pemilik situs web yang menyediakan ruang iklan sedangkan pihak *adsensecamp* sebuah situs yang merupakan sistem untuk mengiklankan produk atau apapun oleh peengiklan atau *advertiser* yang nantinya akan diiklankan oleh blogger atau pemilik web. Perjanjian atau akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dapat disepakati atau terjadi saat pemilik web atau blog mendaftarkan diri kepada *adsensecamp* dan mengikuti segala kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah diatur oleh pihak *adsensecamp*.

Sebagai pemilik web, *publisher* berhak menggunakan layanan yang disediakan serta dilarang menyalahgunakannya seperti spam, pencarian tidak benar, tayangan atau klik tidak sah pada iklan yang ditampilkan *adsensecamp*, seperti melakukan klik atau tayangan yang berasal dari

alamat IP *publisher* sendiri atau komputer yang berada dalam kendali *publisher*. Apabila *publisher* melakukan hal-hal yang bertentangan tersebut maka pihak *adsensecamp* akan membanned akun *adsensecamp* *publisher* dan menghentikan segala bentuk kerjasama secara sepihak.

Pembayaran akan diterima berdasarkan jumlah klik pada iklan yang terpasang pada situs web *publisher* jumlah klik. Pembayaran akan dilakukan apabila penghasilah *publisher* telah mencapai ambang pembayaran, selama tidak ada penangguhan aku dan *publisher* mematuhi kebijakan program *adsensecamp*. Namun, cek atau transfer bank tidak dapat dilakukan pada akhir bulan karena pihak *adsensecamp* harus memvalidasi keakuratan penghasilan terlebih dahulu, proses yang berlangsung pada minggu pertama setiap bulsn berdasarkan penghassilan bulan sebelumnya. Pihak *adsensecamp* akan melakukan pengiriman pembayaran beberapa minggu kemudian, biasanya pada minggu terakhir bulan tersebut. Jika saldo belum mencapai ambang pembayaran pada akhir bulan, pihak *adsensecamp* akan menggulirkan penghasilan ke bulan berikutnya hingga ambang pembayaran dicapai. Saldo mencapai total penghasilan gabungan untuk semua produk iklan *adsensecamp*.

Apabila *publisher* sudah mendapatkan uang 100\$ maka ia akan mendapat cek, umumnya di Indonesia pencairan cek dapat dilakukan menggunakan *Western Union*, *Standart check* atau menggunakan Bank.

Namun perlu diingat bahwa bisnis ini tergolong bukanlah sebuah bisnis yang instan dimana uang akan datang dengan cepat, tentu akan dibutuhkan kesabaran, dan ketekunan dalam menjalankan bisnis ini, mengingat kintan iklan atau isi web adalah yang sangat diperlukan dalam kelancaran bisnis *adsensecamp*. Karena pemilik web harus membuat situs web atau blognya menarik agar banyak pengunjung yang datang mengunjungi situs web atau blog tersebut.

Saat bergabung dengan bisnis periklanan *adsensecamp*, *publisher* akan memperoleh keuntungan atau *income* tanpa harus mengeluarkan modal uang sedikitpun. Namun, keuntungan yang diperoleh dari bisnis *adsensecamp* bukan tanpa usaha, keuntungan tersebut akan didapatkan ketika ada pengunjung yang melakukan klik pada iklan *adsensecamp* yang dipasang pada situs web *publisher* dan akan dihargai sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan, sistem ini disebut *pay per click (ppc)*. Sedangkan pembayaran akan dilakukan saat saldo sudah mencapai 100\$ dan akan dibayar setiap akhir bulan.

Berdasarkan keterangan diatas pembagian keuntungan dilakukan saat saldo sudah mencapai kesepakatan bersama. Baik pihak *adsensecamp* dan *publisher* sama-sama memiliki kontribusi dalam bisnis *adsensecamp*, pihak *adsensecamp* selain sebagai pemilik modal yang berupa iklan-iklan yang akan dipromosikan juga memiliki kecakapan dalam mengatur iklan-iklan yang berhak tayang pada situs web yang dimiliki *publisher*,

sedangkan *publisher* memiliki modal berupa website dan keahlian dalam mengelola website semenarik mungkin untuk meningkatkan pengunjung.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Periklanan *Adsensecamp*

Dalam bisnis periklanan *adsensecamp* telah diatur secara jelas ketentuan-ketentuan tersebut agar dipatuhi pada pihak-pihak yang terkait. Perjanjian merupakan hal yang paling mendasar dari setiap kerjasama atau kemitraan, karena didalamnya terdapat unsur-unsur yang harus atau tidak boleh dilakukan bagi kedua belah pihak yang berserikat. Perjanjian dimaksudkan untuk mengikat sehingga pihak yang berserikat dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Perjanjian dalam hukum Islam disebut akad, akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, maupun yang muncul dari dua pihak.

Dalam bisnis periklanan *adsensecamp* ini pihak yang berakad adalah *publisher* atau pemilik web dengan pihak *adsensecamp*, sedangkan *adsensecamp* adalah sebuah sistem untuk mengiklankan produk atau apapun oleh pengiklan atau *advertiser* yang nantinya akan diiklankan oleh blogger disebut *publisher*.

Pada akad terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi untuk menyatakan suatu akad itu sah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang.
- b. *maudhu al'aqad* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka akan berbeda pula tujuan pokok akad.
- c. *Ma'qud* adalah benda-benda yang diakadkan.
- d. *Shighat al'aqad* ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa rukun akad dari perjanjian bisnis *adsensecamp* adalah *aqid* oleh *publisher* dan pihak *adsensecamp*, *ma'qud* yang berupa sebuah sistem iklan *adsensecamp* itu sendiri, *maudhu al'aqad* atau tujuan dari akad berupa keuntungan yang didapat dari pengiklanan pada situs web *publisher*, sedangkan *shighat al'aqad* terjadi saat pemilik web mendaftarkan dirinya untuk bergabung dalam program sistem *adsensecamp* tersebut.

Adapun mengenai syarat akad para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat dalam berakad, yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan (*syuruth an-nafadz*), dan syarat keharusan (*syuruth al-luzum*).

Syarat terjadinya akad, terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat khusus ialah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akadd nikah.

Menurut ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sah akad apabila terhidar dari enam hal, yaitu: *Al-Jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung jawab); *Al-Ikrah* (keterpaksaan); *Attauqid* (pembatasan waktu); *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan); dan *As-Syartu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak).

Pada syarat pelaksanaan akad bermaksud berlangsungnya akad tidak bergantung pada orang lain, syarat berlakunya sebuah akad yaitu adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad baik secara langsung ataupun perwakilan dan pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain. Syarat kepastian hukum merupakan suatu akad baru yang mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*.

Berdasarkan rukun dan syarat yang dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa akad pada bisnis periklanan *adsensecamp* sudah terpenuhi. Dengan demikian akad bisnis ini termasuk pada akad *shahih*,

yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan berlaku kepada kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan bahwa bisnis periklanan *adsensecamp* termasuk kepada kerjasama perserikatan dimana adanya percampuran modal dan keahlian dari masing-masing pihak, sehingga keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Lebih spesifiknya lagi bisnis periklanan *adsensecamp* termasuk kedalam *syirkah inan*, yakni persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang yang membagi keuntungan dimana tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga dengan wewenang dan keuntungan. Karena dalam bisnis *adsensecamp* pemilik web atau *publisher* memiliki kontribusi yang lebih banyak dalam hal peningkatan *traffic* yang berfungsi untuk meningkatkan klik pada iklan, maka *publisher* biasanya mendapat persentase lebih banyak dari pihak *adsensecamp*.

Secara eksplisit dalam hal ini dimana Al-Qur'an menyatakan pada hakikatnya setiap muslim diwajibkan bekerja sebagai wujud syukur atas segala pemberian Allah, dalam QS. Al-Jumu'ah (62) :10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

Maksud dari ayat diatas menegaskan bahwa Allah SWT menganugerahkan pikiran sehingga manusia dapat dengan bebas berfikir untuk memanfaatkan segala sesuatu menjadi hal yang ekonomis dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun secara tegas tidak ada aturan ayat yang eberikan penjelasan tentang boleh tidaknya melakukan bisnis periklanan *adsensecamp* untuk berbisnis guna menambah pendapatan. Namun cukup jela ayat ini memberikan penjelasan kepada manusia sebagai pijakan normatif terus berkarya dan mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya.

Adsensecamp adalah bisnis yang menerapkan sistem bagi hasil, bagi hasil sendiri disebut *Qiradh* dalam hukum Iskam. *Qiradh* pada umumnya dibagi menjadi dua bagian yakni *mudharabah* dan *musyarakah*, *mudharabah* menerapkan konsep bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja, dimana sluruh modal didapat dari pemilik modal dan pekerja sepenuhnya yang menjalankan pekerjaan dengan pembagian keuntungan disepakati bersama.

Sedangkan *musyarakah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *musyarakah* “perkongsiam adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yaitu keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk memanfaatkan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.”

Adsensecamp merupakan bentuk kerja sama antara *publisher* yaitu pemilik blog atau website. Pihak *Adsensecamp* selaku pemilik modal yang dalam hal ini yang berupa iklan yang dikelola oleh pihak *Adsensecamp* sedangkan *publisher* selaku pemilik web yang ditempatkan iklan membantu mempublikasikan iklan dengan menggunakan media blog atau website nya yang dikelola langsung oleh *publisher*. Dengan berbekal menggunakan kreatifitas dan keuletan dalam mengelola blog, *publisher* diharapkan dapat menarik para pengunjung website atau blog yang nantinya akan menambah jumlah klik pada suatu iklan di web atau blog tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan adalah *syirkah* masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bisnis, pihak *adsensecamp* dengan iklan dan layanannya sedangkan *publisher* dengan blog dan konten yang ia muat dalam blognya sendiri.

Dengan demikian berbisnis periklanan *adsensecamp* sejalan dengan aturan konsep hukum Islam. Tidak ada satu ayat pun dan hadits yang melarang berbisnis *adsensecamp* , bahkan islam menganjurkan agar umatnya selalu memiliki kreatifitas untuk mencari rizki dan karunia Allah SWT.

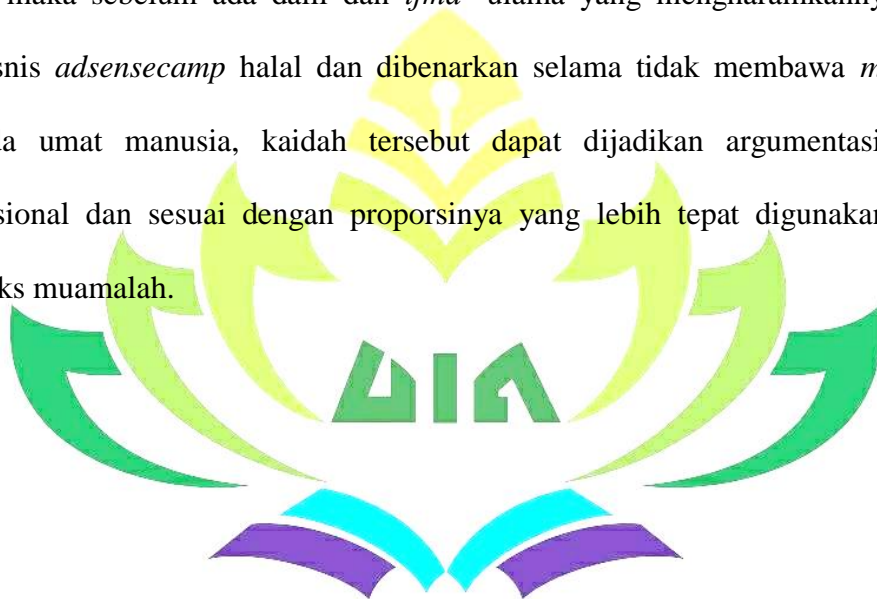
Dalam pandangan hukum Islam, sesuatu hukum atau kaus yang tidak ada nash yang jelas melarang atau menganjurkan, maka hal tersebut hukumnya diperbolehkan, asal sesuatu dalam masalah bidang muamalah adalah keboleham, sebagaimana yang dikemukakan para ahli Ushul dalam sebuah kaidah fihiyyah.

Kaidah tersebut sejalan dengan filosofi hukum Islam, yaitu tidak memberatkan dan tidak banyak beban, dan kaidah tersebut dilandasi dengan firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah (2) : 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah (2) : 185)

Ketentuan boleh tidaknya berbisnis *adsensecamp* tidak ada nash yang jelas, maka sebelum ada dalil dan *ijma'* ulama yang mengharamkannya maka berbisnis *adsensecamp* halal dan **dibenarkan** selama tidak membawa *mudharat* kepada umat manusia, kaidah tersebut dapat dijadikan argumentasi secara profesional dan sesuai dengan proporsinya yang lebih tepat digunakan dalam konteks muamalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas mengenai bisnis periklanan *adsensecamp* terkait perjanjian atau akad, sistem kerja dan pembayaran beserta analisis hukum islam telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan:

1. *Adsensecamp* adalah sebuah situs yang mana didalamnya terdapat sebuah sistem untuk mengiklankan produk atau apapun yang dipasang pada situs web atau blog milik *publisher*. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pembayaran berupa pembagian keuntungan dari pihak *adsensecamp* untuk setiap iklan yang di klik oleh pengunjung situs web atau blog tersebut, yang dikenal dengan sistem *pay per click (ppc)* atau bayar perklik. Pembayaran dalam bisnis ini dilakukan apabila *publisher* telah mendapatkan klik yang seharga dengan 100\$, hal ini sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan antara pihak *adsensecamp* dengan *publisher*.
2. Akad dalam bisnis *adsensecamp* dilakukan oleh dua pihak yaitu *publisher* dan pihak *adsensecamp*. *Publisher* merupakan pemilik situs web yang menyediakan ruang iklan sedangkan pihak *adsensecamp* merupakan sebuah situs yang mengelola iklan yang akan ditampilkan pada situs web yang telah didaftarkan. Perjanjian atau akad dalam bisnis ini termasuk kedalam akad *sahih* karena terpenuhinya rukun dan syarat dari akad,

seperti aqid oleh pihak *adsensecamp* dan *publisher* , *ma'qud* yang berupa program atau situs *adsensecamp* itu sendiri, *maudhu al'aqad* atau tujuan dari akad berupa keuntungan yang didapat dari pengiklan yang dipasang pada situs web *publisher* , sedangkan *shighat al'aqad* terjadi pada saat pemilik web mendaftarkan dirinya kepada sistem bisnis *adsensecamp* sistem kerja yang diterapkan dalam bisnis ini termasuk *musyarakh* yang selaku pemilik modal berkontribusi dalam bisnis, pihak *adsensecamp* selaku pemilik modal yang dalam hal ini berupa iklan, dikelola oleh pihak *adsensecamp* sedangkan *publisher* selaku mitra kerja yang membantu mempublikasikan iklan dengan menggunakan media blog atau website nya yang dikelola langsung oleh *publisher*.

B. Saran

1. Bagi pihak pengelola *adsensecamp*

Memberikan program khusus *adsensecamp* syariah dimana keuntungan antara pihak *adsensecamp* dan *publisher* dilakukan dengan cara bagi hasil sehingga masyarakat muslim yang memiliki situs web atau blog yang membuat konten Islamiyah akan banyak tertarik untuk bergabung dalam bisnis *adsensecamp* ini.

2. Bagi *publisher*

Publisher sebaiknya melakukan bisnis ini secara adil dan tidak bergabung dengan program-program *traffic* sehingga tidak merugikan siapapun dan

tidak melakukan kecurangan-kecurangan untuk menmbah jumlah klik pada iklan di situs web publisher sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A.M Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2004.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research, Jilid 1*, Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi, Yogyakarta, 1981.
- Hadjar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2001.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Gaya Mediapratama, Jakarta, 2007.
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. 7*, CV Mandar Maju, Bandung, 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta 1997.
- Mardalis. *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, 2016.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2001.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Cet 1*, robbani Pers, Jakarta, 1997.

Rivai, Veithzal, Arifiandy Permata Veithza, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT Asdi Mahasatya, Jakarta 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2002.

Sumitro, warkum, *Perkembangan Hukum Islam Ditengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Jawa Timur, 2005.

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Syamsudin, Air, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.

Tika, Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta 2006.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Yusanto, Muhammad Ismail, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2002.

Sumber internet :

<http://coretan-uman.blogspot.com/2013/03/apa-itu-adsense-Indonesia-atau-AdsensCamp.html?m=1>. Tanggal akses 19 Maret 2013.

<http://pembayaranadsense.blogspot.co.id/2013/12/Pembayaran-adsense.html?m=1> Pembayaran Adsense, tersedia di: “Informasi Tentang Cara Pembayaran Google Adsense”, Tanggal Akses 15 Januari 2016.

<http://sipakainga.blogspot.com/2015/05/syarat-syarat-sebagai-publisers-adsensecamp.html>. Tanggal akses 2015.

<https://adsensecamp.com>. Tanggal akses 7 juli 2019.